

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pemerintah Daerah wajib bertanggung jawab atas pengolahan laporan keuangan. Laporan keuangan memiliki keutamaan, dijadikan sebagai informasi Sumber Daya Ekonomi, landasan pelaksanaan aktivitas kegiatan pemerintahan, penilaian aktivitas ketepatan pengerjaan dalam satuan pelaporan, penilaian keadaan keuangan dan membantu dalam kepatuhan terhadap aturan yang tertulis dalam undang-undang (hernanda dan Setiyawati, 2020).

Pemerintah memproses data keuangan publik untuk Menyusun laporan keuangan, tanggung jawab atas pelaksanaan keuangan publik tercatat dalam aturan UU No. 17 Tahun 2003 berisikan pembahasan Keuangan Negara (Alfian, 2015). Di dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk melakukan penerbitan informasi keuangan ke sebuah bentuk laporan keuangan selama kurun waktu satu periode kepada pemegang kepentingan. Laporan keuangan pemerintah daerah digunakan oleh pihak pemegang kepentingan sebagai landasan pengambilan keputusan (Kusuma Negara et al., 2018).

Dengan penjelasan yang sudah disampaikan, laporan keuangan harus benar-benar disusun secara baik dan benar, Aparatur pemerintah

daerah harus berusaha menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan sungguh-sungguh agar laporan keuangan dapat memberikan manfaat maksimal bagi para penggunanya. karena sesungguhnya Allah SWT maha mengetahui suatu pekerjaan yang kita lakukan dan suatu saat seluruh pekerjaan yang telah dikerjakan akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT.

Allah SWT telah berfirman dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 105 bunyinya:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya:

Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”

Pemerintah Daerah harus meningkatkan kualitas laporan keuangan, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk memberikan informasi tentang kondisi pemanfaatan sumber daya dan anggaran yang di agendakan dalam periode tertentu, informasi ini sebagai bukti dalam proses menjalankan pemerintahan (Bondan S. et al., 2017). Dalam upaya meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya, Adanya faktor-faktor tersebut dapat mendorong Laporan keuangan menjadi lebih berkualitas, menurut penelitian-penelitian yang telah dilaksanakan Faktor-faktor itu adalah Implementasi Sistem

Akuntansi Pemerintahan, Komitmen Organisasi, Pengendalian Intern dan Kompetensi Sumber Daya Manusia.

Sihite & Holiawati (2017) mengungkapkan apabila Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan yang riil dan interpretasinya sesuai Akuntansi Keuangan Daerah dalam pelaksanaan keuangan (SKPD) maka akan berpengaruh meningkatkan kualitas laporan keuangan. Komitmen Organisasi dapat diartikan sebagai keselarasan yang berpengaruh untuk melaksanakan satu hal terhadap diri sendiri, kelompok organisasi dan orang luar, Secara garis besar komitmen organisasi adalah bayangan seseorang untuk mengenal organisasi selaras dan terpaku terhadap visi dan misi dari organisasinya (hernanda dan Setiyawati, 2020). Sihite & Holiawati (2017) mengungkapkan Pengendalian Internal adalah suatu upaya untuk meningkatkan perlindungan kekayaan organisasi dengan cara meminimalkan pemborosan dan penyimpangan, caranya dengan Memaksimalkan efisiensi, efektivitas dan ekonomis kinerja. Kompetensi Sumber Daya Manusia merupakan sebuah karakteristik dasar seseorang untuk melakukan identifikasi suatu hal, hal tersebut seperti cara berfikir, bertindak, dan bersikap dalam kurun waktu tertentu. Kompetensi Sumber Daya Manusia juga mempengaruhi seseorang untuk bekerja dengan pengetahuan dan keterampilan berdampak untuk menyelesaikan pekerjaan dengan lebih mudah, intuitif, cepat dan dapat meminimalkan kesalahan (Mahardini & Miranti, 2018).

Badan Pengawas Keuangan RI perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, mengungkapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman mendapatkan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah di Tahun Anggaran 2020 adalah WTP (wajar tanpa pengecualian), dan Ini merupakan kali ke sepuluh secara berturut-turut Pemerintah Kabupaten Sleman menerima opini WTP. hal ini menjadikan motivasi bagi penulis untuk mengetahui apakah di dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman terdapat kontribusi atas Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan, Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Intern dan Kompetensi Sumber Daya Manusia dapat mendorong laporan keuangan pemerintah daerah menjadi lebih berkualitas.

Sihite & Holiawati (2017) melaksanakan penelitian tentang kuliatas laporan keuangan, menguji variabel Standar Akuntansi Pemerintah, SPI dan Kompetensi Staff Akuntansi hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya keterkaitan. Standar Akuntansi Pemerintah, SPI dan Kompetensi Staff Akuntansi berarah signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penulis memiliki motivasi untuk mengembangkan penelitian yang telah dilakukan oleh Sihite & Holiawati (2017) dengan menambahkan variabel komitmen organisasi.

Dari penjelasan diatas penulis dalam penelitian ini akan melaksanakan penelitian dengan judul: **PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN, KOMITMEN ORGANISASI, PENGENDALIAN INTERN DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA**

**MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH (Studi kasus pada SKPD Pemerintah
Daerah Kabupaten Sleman).**

Penelitian ini replikasi dari penelitian Sihite & Holiawati (2017) yang meneliti tentang Kualitas laporan keuangan menguji variabel Standar Akuntansi Pemerintah, SPI dan Kompetensi Staf Akuntansi sebagai variabel independen terhadap Kualitas Laporan Keuangan sebagai variabel dependen. Dan pengembangan penelitian dari Mutiana, Diantimala dan zuraida (2017) tentang Kualitas laporan keuangan dengan menguji Pengaruh sistem pengendalian intern, teknologi informasi, kualitas sumber daya manusia dan komitmen organisasi sebagai variabel independen terhadap kualitas laporan keuangan sebagai variabel dependen.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti menyusun rumusan masalah adalah berikut:

1. Apakah Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah?
2. Apakah Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah?
3. Apakah Pengendalian Intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah?
4. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan masalah yang dijelaskan tersebut, maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.
2. Untuk mengetahui pengaruh Komitmen Organisasi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.
3. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.
4. Untuk Mengetahui pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

D. Manfaat

Penulis berharap penelitian ini dapat memiliki manfaat:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan suatu pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi sektor publik. Penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk melaksanakan penelitian-penelitian selanjutnya dengan topik yang sama.

2. Manfaat Praktis

Di bidang praktis penelitian ini bermanfaat:

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi pengetahuan baru bagi instansi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah mengenai masalah laporan keuangan daerah dan dapat dijadikan rujukan dalam hal pengambilan keputusan atau kebijakan bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana informasi yang bermanfaat bagi masyarakat terkait kualitas laporan keuangan organisasi pemerintah daerah, yang membahas tentang pengaruh adanya Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan, Komitmen Organisasi, Pengendalian Intern dan Kompetensi Sumber Daya Manusia.

